

Sebut Banyak Aset Daerah Tak Produktif



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 04/11/2025

Samarinda – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur Edih Mulyadi mengatakan, masih banyak infrastruktur daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. “Saya empat bulan di Kalimantan Timur, melihat beberapa infrastruktur itu *idle* (tidak produktif). Contohnya stadion, ruang olahraga, dan lainnya. Poinnya adalah bagaimana setiap barang milik daerah bisa menghasilkan *income* (pendapatan),” ujar Edih, Senin (3/11).

Dia menjelaskan, pemanfaatan aset bisa dilakukan melalui berbagai pola seperti sewa, pinjam pakai, atau kerja sama pemanfaatan. Langkah itu dinilai mampu menjadi peluang baru bagi Pemda dalam meningkatkan pendapatan. “Tentu ini juga menjadi peluang bagi Pemda untuk bisa menghasilkan *income* di daerah yang bersangkutan,” katanya. Selain itu, Edih juga menyoroti kerja sama pembiayaan infrastruktur dengan pihak swasta atau BUMN. Dia mencontohkan, beberapa daerah telah mengembangkan proyek penerangan jalan umum (PJU) dengan pola kerja sama. “Beberapa Pemda membangun infrastruktur penerangan jalan, taman, dan lain-lain, nanti dibayar dari pajak penerangan jalan itu sendiri,” jelasnya.

Skema serupa juga dapat diterapkan untuk pembangunan rumah sakit daerah. Dijelaskan, rumah sakit bisa dibangun oleh pihak swasta melalui kerja sama pemanfaatan (KSP). “Nanti dibayar dari apa yang dibayarkan pasien rumah sakit. Ini beberapa peluang yang bisa diambil,” ujarnya. Meski begitu, Edih mengingatkan agar setiap bentuk kerja sama dengan swasta dijalankan dengan tata kelola yang baik. Banyak proyek *CSR*ⁱ atau hibah yang justru bermasalah karena administrasinya lemah. “Seringkali ada *CSR* dibangun sesuatu, tapi administrasinya itu lemah. Padahal itu hibah, kalau tidak hati-hati bisa jadi masalah,” tegasnya.

Di sisi lain, Edih menyinggung pentingnya kajian matang sebelum mengambil pinjaman daerah. Sebab, jika Pemda tidak mampu mencicil, konsekuensinya cukup berat. “Kalau tidak bisa nyicil, maka dana bagi hasil atau dana transfer bisa dipotong. Jadi perlu pengkajian yang cermat,” terangnya.

Dia juga mendorong agar dana transfer dari pusat dapat bersinergi dengan program kementerian dan lembaga. Menurutnya, koordinasi yang baik dengan kementerian terkait akan membuka lebih banyak peluang pembangunan infrastruktur di daerah. “Kalau Kepala Dinas tidak terlalu aktif mencari informasi dan berkolaborasi, maka peluang mendapatkan proyek infrastruktur di daerah bisa berkurang,” ucapnya. Melalui pemanfaatan aset, kerja sama swasta, dan perencanaan yang matang, Edih berharap daerah bisa membangun secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana pusat. “Kuncinya bagaimana Pemda berkolaborasi secara efektif agar potensi daerah bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dia juga meminta pemerintah daerah tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat. Edih menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan data perpajakan dan tata kelola yang transparan. Menurut Edih, salah satu langkah strategis adalah mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), dua lembaga ini dapat menyelaraskan data perpajakan agar potensi PAD tidak bocor.

Dia mencontohkan, perusahaan pengelola SPBU seharusnya melaporkan data yang sama baik ke pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, di satu sisi ada pajak pusat dan di sisi lain ada pajak daerah seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sinkronisasi itu disebutnya penting agar potensi penerimaan tidak tumpang tindih. Selain itu, Edih menyoroti perlunya modernisasi administrasi perpajakan daerah. Dia menilai, banyak restoran atau rumah makan yang belum menerapkan sistem digital dalam pelaporan pajak. “Saya sering makan di warung satu cukup mahal, tapi notanya ditulis tangan. Ada pajak 10 persen, tapi saya ragu apakah pajak yang saya bayar itu benar-benar masuk ke kas Pemda,” katanya.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan digitalisasi sistem pemungutan pajak restoran dan hotel. Langkah tersebut diyakini dapat memperkuat pengawasan dan memastikan pajak benar-benar masuk ke kas daerah. Tidak hanya sistem,

Edih juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik dalam urusan pajak. Petugas pajak daerah harus mampu membuat masyarakat membayar pajak tanpa merasa terbebani. “Komunikasi publik itu penting. Orang pajak harus bisa membuat orang membayar tapi dengan tersenyum,” tuturnya.

Dia juga menegaskan bahwa pelayanan yang mudah dan transparan akan menumbuhkan kepercayaan publik. “Jangan sampai mau bayar saja sulit. Kalau kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan pasti dan tepat, mereka akan senang membayar pajak,” tambahnya. Melalui sinergi antara pusat dan daerah, serta modernisasi tata kelola, Edih berharap ketergantungan daerah terhadap dana pusat dapat berkurang. “Bagaimana Pemda bisa meningkatkan PAD dan tidak terlalu tergantung kepada pusat, itu kuncinya,” pungkasnya.
(ndu)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Sebut Banyak Aset Daerah Tak Produktif, 04/11/2025

Catatan:

1. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
3. Dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa keuangan daerah meliputi kekayaan

daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

ⁱ CSR adalah singkatan dari *Corporate Social Responsibility*.

Dijelaskan dalam situs Bank Woori Saudara, CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan.

([https://www.bankwoorisaudara.com/tentang-bws/corporate-social-responsibility#:~:text=Corporate%20Social%20Responsibility%20\(CSR\)%20\(CSR\)%20adalah%20suatu,lingkungan%2C%20kesehatan%2C%20sosial%20dan%20juga%20ekonomi%20berkelanjutan.](https://www.bankwoorisaudara.com/tentang-bws/corporate-social-responsibility#:~:text=Corporate%20Social%20Responsibility%20(CSR)%20(CSR)%20adalah%20suatu,lingkungan%2C%20kesehatan%2C%20sosial%20dan%20juga%20ekonomi%20berkelanjutan.))